KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA
Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838000, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenparekraf.go.id
Laman: kemenparekraf.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR PEM/4/KP.04/S/2024

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ditugaskan di lingkungan Kemenparekraf dengan ketentuan pada pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024; dan
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

B. JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI CPNS KEMENPAREKRAF

Jumlah kebutuhan CPNS di lingkungan Kemenparekraf sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kebutuhan CPNS Kemenparekraf

NO	KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN
1.	Formasi Umum	369
2.	Formasi Khusus Penyandang Disabilitas	8
3.	Formasi Khusus Putra/Putri Kalimantan	15
TOTAL		**392**

C. LOKASI KEBUTUHAN

Lokasi penempatan sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
2. Inspektorat Utama;
3. Deputi Bidang Kebijakan Strategis;
4. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
5. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
6. Deputi Bidang Industri dan Investasi;
7. Deputi Bidang Pemasaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events);
9. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif;
10. Politeknik Pariwisata NHI Bandung;
11. Politeknik Pariwisata Bali;
12. Politeknik Pariwisata Medan;
13. Politeknik Pariwisata Makassar;
14. Politeknik Pariwisata Palembang;
15. Politeknik Pariwisata Lombok;
16. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;
17. Badan Pelaksana Otorita Borobudur; dan
18. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.

D. JENIS KEBUTUHAN

1. **Kebutuhan Umum** adalah pelamar yang melamar pada formasi umum serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Kebutuhan Khusus,** meliputi**:**
   a. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. **Putra/Putri Kalimantan** adalah pelamar yang berasal dari putra/putri Kalimantan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis kebutuhan ini diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara.
3. Pelamar yang berstatus penyandang disabilitas juga diperkenankan melamar di Kebutuhan Umum selama masih memenuhi persyaratan yang berlaku dan bagi yang demikian diberlakukan ketentuan:
   a. Memiliki ijazah dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
   b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
      1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

E. NAMA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS KEBUTUHAN, DESKRIPSI, RENTANG PENGHASILAN, ALOKASI KEBUTUHAN JABATAN, DAN UNIT PENEMPATAN CPNS

Rincian dari 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) kebutuhan Jabatan yang akan diisi melalui Pengadaan CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran IV serta Informasi Deskripsi Jabatan dan Rentang Penghasilan tercantum dalam Lampiran V Pengumuman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

F. PERSYARATAN UMUM CPNS

Berikut adalah persyaratan umum bagi pelamar Pengadaan CPNS Kemenparekraf.

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamaran.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan.
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Selain ketentuan tersebut diatas, pelamar juga harus memenuhi ketentuan:

1. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pada pengadaan di periode sebelumnya.
2. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Dalam hal pelamar berstatus PPPK yang melamar pada pengadaan CPNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.

G. PERSYARATAN KHUSUS WAJIB DAN SERTIFIKASI WAJIB TAMBAHAN

1. Berijazah Magister/Master (S-2), Sarjana (S-1)/Sarjana Terapan (D-IV), dan Diploma (D-III) sesuai dengan Jabatan yang dipilih pelamar (**Surat Keterangan Lulus/SKL atau Ijazah Sementara TIDAK BISA digunakan**).
2. Pelamar dengan status lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
3. Pelamar dengan status lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Nilai minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang harus dimiliki oleh pelamar adalah sebagai berikut:
   a. Pelamar lulusan S-2 memiliki minimal IPK sebesar 3,00 (tiga koma nol nol);
   b. Pelamar lulusan S-1/D-IV memiliki minimal IPK sebesar 3,00 (tiga koma nol nol); dan
   c. Pelamar lulusan D-III memiliki minimal IPK sebesar 2,75 (dua koma tujuh lima).
5. Pelamar yang melamar pada jenis kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus melampirkan:
   a. surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
   b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
6. Pelamar yang melamar pada jenis kebutuhan putra/putri Kalimantan harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.
7. Pelamar yang melamar pada Jabatan Dosen Asisten Ahli khusus untuk **Sub Jabatan Dosen Vokasi Pariwisata harus merupakan lulusan vokasi bidang kepariwisataan pada jenjang pendidikan sebelumnya** yang dibuktikan dengan melampirkan Ijazah D-IV/D-III vokasi pariwisata bersama Ijazah S-2 yang diunggah di SSCASN. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Sub Jabatan Dosen Non Vokasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, pelamar yang melamar pada jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku pada saat pelamaran sesuai Jabatan yang dilamar, yaitu:
   a. Dokter Ahli Pertama – STR yang dilampirkan bukan merupakan STR Internship bagi profesi dokter;
   b. Perawat Ahli Pertama;
   c. Perawat Terampil; dan
   d. Terapis Gigi dan Mulut Terampil.

H. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR CPNS

Berikut adalah tata cara pendaftaran Pengadaan CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024:

1. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung dilakukan secara online melalui laman: https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
2. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
   a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, dilengkapi **e-meterai** Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena (Formulir Lamaran pada Lampiran I);
   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) atau Bukti Identitas Kependudukan lainnya, bagi **pelamar pada kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan, KTP yang dilampirkan merupakan KTP di Kabupaten/Kota Kalimantan**;
   c. Ijazah Asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
   d. Transkrip Nilai Ijazah Asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
   e. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

f. Pas foto terbaru (bukan *selfie*) menggunakan pakaian formal (bukan kaos/T-Shirt) dengan latar belakang warna merah;
g. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang diketik menggunakan komputer, dilengkapi **e-meterai** Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena (Formulir Surat Pernyataan pada Lampiran II);
h. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah Penempatan yang diketik menggunakan komputer, dilengkapi **e-meterai** Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena (Formulir Surat Pernyataan pada Lampiran III);
i. Penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
   1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas Asli yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
   2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
j. Dokumen syarat khusus dan sertifikasi wajib tambahan sesuai dengan Jabatan dan jenis kebutuhan formasi yang dilamar.

3. Meterai yang digunakan hanya meterai elektronik/e-meterai dengan ketentuan:
   a. setiap 1 (satu) meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis dokumen; dan
   b. penempatan e-meterai tidak boleh tumpang tindih dengan tandatangan (pembubuhan tanda tangan tidak terkena e-meterai) yang dibubuhkan agar tidak mengganggu proses validasi e-meterai.
4. Semua dokumen hasil ***scan*** yang diunggah/upload agar dipastikan dapat terbaca dengan jelas dan tidak blur.
5. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimulai pada tanggal 20 Agustus s.d. 6 September 2024 (ditutup pukul 23.59 WIB).

I. TAHAPAN SELEKSI CPNS

Tahapan Seleksi CPNS pada Pengadaan CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Seleksi Administrasi

   Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Apabila dokumen pelamaran yang dilampirkan tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
   a. SKD dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.

c. SKD meliputi:

1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal. Bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

2) Tes Intelegensia Umum (TIU)

TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan analogi, silogisme, dan analitis. TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal. Bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal. Bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

d. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit.

e. Durasi waktu bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas sebanyak 130 (seratus tiga puluh) menit.

f. Pelamar pada Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023. Ketentuan penggunaan nilai dimaksud diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

g. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

a. SKB dilaksanakan dengan menggunakan CAT BKN.

b. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

c. Materi SKB disesuaikan dengan Jabatan yang dilamar.

d. **Pengadaan CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 tidak melaksanakan SKB tambahan selain SKB dengan menggunakan CAT BKN**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

J. JADWAL SELEKSI PENGADAAN CPNS

Tabel 2
Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT (**Tidak diadakan Kemenparekraf**)	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

K. SISTEM KELULUSAN CPNS

1. Seleksi Administrasi
   a. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dengan mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran melalui SSCASN.
   b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus Seleksi Administrasi.
   c. Kelulusan Seleksi Administrasi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf pada laman https://kemenparekraf.go.id. Hasil tersebut juga dapat diperoleh oleh akun SSCASN masing-masing pelamar.
   d. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman Seleksi Administrasi dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui SSCASN.
   e. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Sanggahan dapat diterima apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar. Sanggahan dapat ditolak apabila kesalahan berasal dari pelamar.
   f. Dalam hal Sanggahan diterima, hasil Kelulusan Seleksi Administrasi akan diumumkan kembali oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf.
   g. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari SSCASN.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
   a. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas (NAB) yang diatur sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negari Sipil Tahun Anggaran 2024 setelah dilakukan pemeringkatan.
   b. Penetapan NAB untuk jenis kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan adalah sebagai berikut:
      1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
      2) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
      3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
   c. Penetapan NAB untuk jenis kebutuhan khusus penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:
      1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
      2) 60 (enam puluh) untuk TIU.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Pelamar yang lulus SKD adalah banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi NAB.
e. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, sampai dengan TWK.
f. Apabila nilai SKD yang telah diurutkan sebagaimana dimaksud pada huruf e. masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
g. Kelulusan SKD akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf pada laman https://kemenparekraf.go.id. Hasil tersebut juga dapat diperoleh oleh akun SSCASN masing-masing pelamar.
h. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan Kelulusan Seleksi Akhir
   a. SKB dilaksanakan dengan menggunakan CAT BKN.
   b. Hasil akhir seleksi ditentukan berdasarkan pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB oleh Panselnas.
   c. Pengolahan hasil integrasi nilai, dilakukan sesuai ketentuan berikut:
      1) SKD dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen); dan
      2) SKB dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen).
   d. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
      1) nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
      2) jika nilai kumulatif SKD masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, sampai dengan TWK yang tertinggi;
      3) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK yang tertinggi; dan
      4) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
   e. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, maka pengisian kebutuhan dilakukan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
   f. Kelulusan Seleksi Akhir akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf pada laman https://kemenparekraf.go.id. Hasil tersebut juga dapat diperoleh oleh akun SSCASN masing-masing pelamar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

g. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman Hasil Seleksi Akhir dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil Seleksi Akhir diumumkan melalui SSCASN.
h. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Sanggahan dapat diterima apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar. Sanggahan dapat ditolak apabila kesalahan berasal dari pelamar.
i. Dalam hal Sanggahan diterima, hasil Kelulusan Seleksi Akhir akan diumumkan kembali oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf.
j. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.

L. LAIN-LAIN

1. Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat memilih opsi “Disabilitas” pada laman SSCASN dan melakukan pengisian sesuai dengan petunjuk pada aplikasi.
2. Pelamar pada jenis kebutuhan putra/putri Kalimantan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan penempatan di Ibu Kota Nusantara.
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 jenis pengadaan ASN di tahun anggaran yang sama, sehingga **pelamar yang melamar pada Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 tidak dapat melamar kembali pada Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024**.
4. Tempat pelaksanaan SKB dan SKD dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan pada SSCASN.
5. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Panselnas untuk mendapatkan pengganti sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti, pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
8. Apabila pelamar dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di website resmi Kemenparekraf pada tautan www.kemenparekraf.go.id. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi atau keputusan terakhir.
10. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
11. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas.
12. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
13. Kelulusan pelamar adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para pelamar, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait pelaksanaan Pengadaan CPNS Kemenparekraf. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
14. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
15. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
16. Pengaduan, pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Pengadaan CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi Whatsapp 0856-9346-3824 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, Pukul 08.00 – 16.00 WIB).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024
a.n Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,

${ttd}

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Ni Wayan Giri Adnyani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN IV
Pengumuman Nomor: PEM/4/KP.04/S/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

NAMA JABATAN, JENIS FORMASI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI, DAN LOKASI PENEMPATAN PENGADAAN CPNS KEMENPAREKRAF T.A. 2024

No	Jabatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Lokasi Penempatan	Keterangan
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	D-IV ANIMASI - S-1 SEJARAH - S-1 SENI MURNI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Direktorat Musik, Film, dan Animasi	
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital	
3	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	S-1 HUKUM - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 PARIWISATA - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Direktorat Manajemen Investasi	
4	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Direktorat Aplikasi, Permainan, Televisi, dan Radio	
5	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN - D-IV PARIWISATA - S-1 ARSITEKTUR	2	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Direktorat Kuliner, Kriya, Desain, dan Fesyen	
6	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 SEJARAH - S-1 ILMU KOMUNIKASI - D-IV ANIMASI - S-1 SENI MURNI	1	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Direktorat Musik, Film, dan Animasi	
7	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 SEJARAH - S-1 SENI MURNI	2	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Direktorat Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif	
8	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital	
9	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 PARIWISATA - S-1 EKONOMI	2	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Direktorat Akses Pembiayaan	
10	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 MANAJEMEN - S-1 PARIWISATA - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Direktorat Manajemen Industri	
11	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 PARIWISATA - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	5	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Direktorat Manajemen Investasi	
12	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV DESTINASI PARIWISATA - S-1 MANAJEMEN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 PARIWISATA	1	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	
13	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV DESTINASI PARIWISATA - S-1 PARIWISATA - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Direktorat Pengembangan Destinasi I	
14	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PARIWISATA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PARIWISATA	1	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Direktorat Pengembangan Destinasi II	
15	ANALIS DATA ILMIAH AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 MATEMATIKA	3	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Pusat Data dan Sistem Informasi	

No	Jabatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Lokasi Penempatan	Keterangan
16	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM	1	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi	
17	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM	1	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) | Sekretariat Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi	
18	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM	1	Inspektorat Utama | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi	
19	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM	2	Politeknik Pariwisata Bali | Bagian Administrasi Umum | Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Tata Usaha	
20	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM	1	Politeknik Pariwisata Lombok | Subbagian Administrasi Umum	
21	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM	1	Politeknik Pariwisata NHI Bandung | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian dan Keuangan	
22	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM	2	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan	
23	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Parekraf	
24	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) | Direktorat Event Daerah	
25	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	D-IV USAHA PERJALANAN WISATA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) | Direktorat Wisata Minat Khusus	
26	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUKUM	1	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital	
27	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 PARIWISATA - S-1 HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Direktorat Manajemen Investasi	
28	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Direktorat Kajian Strategis	
29	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 MANAJEMEN	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Direktorat Manajemen Strategis	
30	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Direktorat Regulasi	
31	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi	
32	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV USAHA PERJALANAN WISATA - D-IV DESTINASI PARIWISATA - S-1 MATEMATIKA - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - D-IV MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL - S-1 PARIWISATA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI - S-1 TEKNIK SIPIL - D-IV PENGELOLAAN USAHA REKREASI	3	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Direktorat Pengembangan Destinasi II	
33	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) | Direktorat Event Daerah	

No	Jabatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Lokasi Penempatan	Keterangan
34	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUKUM	2	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) | Direktorat Event Nasional dan Internasional	
35	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 PARIWISATA - S-1 HUKUM	2	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) | Direktorat Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran	
36	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV USAHA PERJALANAN WISATA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) | Direktorat Wisata Minat Khusus	
37	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PARIWISATA - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUKUM	5	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan	
38	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 AKUNTANSI	2	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Strategis	
39	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 AKUNTANSI	1	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	
40	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKUNTANSI	2	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan	
41	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 AKUNTANSI	1	Inspektorat Utama | Bagian Umum	
42	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 AKUNTANSI - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	2	Politeknik Pariwisata Lombok | Subbagian Administrasi Umum	
43	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	Politeknik Pariwisata Medan | Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum | Subbagian Administrasi Umum	
44	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN	2	Politeknik Pariwisata NHI Bandung | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian dan Keuangan	
45	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Keuangan	
46	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 AKUNTANSI	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
47	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 PSIKOLOGI	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
48	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 PSIKOLOGI - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Parekraf	
49	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU INFORMATIKA	1	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi	
50	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 MANAJEMEN	1	Politeknik Pariwisata NHI Bandung | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian dan Keuangan	
51	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Keuangan	
52	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
53	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 KEARSIPAN	1	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Bagian Umum | Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	

No	Jabatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Lokasi Penempatan	Keterangan
54	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI	1	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Bagian Umum | Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
55	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 MANAJEMEN	1	Inspektorat Utama | Bagian Umum | Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
56	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV KEARSIPAN DIGITAL - S-1 MANAJEMEN	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Keuangan	
57	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SASTRA INDONESIA - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan	
58	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	D-III ILMU ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ILMU KESEKRETARIATAN - D-III KESEKRETARIATAN BK. PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Bagian Umum | Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
59	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	D-III MANAJEMEN KEARSIPAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Bagian Umum | Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
60	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	D-III MANAJEMEN - D-III KEARSIPAN	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Keuangan	
61	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
62	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 TEKNIK SIPIL	2	Inspektorat Utama | Inspektorat I	
63	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 TEKNIK SIPIL	2	Inspektorat Utama | Inspektorat II	
64	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	Kualifikasi pendidikan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan | Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga | Subbagian Urusan Dalam dan Pengamanan | Klinik Pratama Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | POLI UMUM	
65	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 AKUNTANSI	1	Politeknik Pariwisata Bali	Dosen Non-Vokasi
66	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 PARIWISATA	2	Politeknik Pariwisata Bali	Dosen Vokasi Pariwisata
67	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 HUKUM	1	Politeknik Pariwisata Bali	Dosen Non-Vokasi
68	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	2	Politeknik Pariwisata Bali	Dosen Non-Vokasi
69	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 PARIWISATA	8	Politeknik Pariwisata Lombok	Dosen Vokasi Pariwisata
70	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 STATISTIKA - S-2 STATISTIKA TERAPAN	1	Politeknik Pariwisata Lombok	Dosen Non-Vokasi
71	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 ADMINISTRASI PUBLIK - S-2 MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN - S-2 MANAJEMEN	2	Politeknik Pariwisata Lombok	Dosen Non-Vokasi
72	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 ILMU KOMPUTER - S-2 BISNIS DIGITAL - S-2 SISTEM INFORMASI - S-2 ILMU INFORMATIKA - S-2 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	Politeknik Pariwisata Lombok	Dosen Non-Vokasi
73	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 PENGELOLAAN PERHOTELAN - S-2 TERAPAN PENGELOLAAN PERHOTELAN	2	Politeknik Pariwisata Lombok	Dosen Vokasi Pariwisata
74	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 PERENCANAAN WILAYAH - S-2 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	Politeknik Pariwisata Makassar	Dosen Non-Vokasi
75	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 ANIMASI - S-2 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	Politeknik Pariwisata Makassar	Dosen Non-Vokasi
76	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 PARIWISATA	4	Politeknik Pariwisata Makassar	Dosen Vokasi Pariwisata
77	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 MANAJEMEN - S-2 MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN - S-2 BISNIS DIGITAL	2	Politeknik Pariwisata Makassar	Dosen Non-Vokasi
78	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA - S-2 LINGUISTIK INDONESIA	2	Politeknik Pariwisata Medan	Dosen Non-Vokasi
79	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	Politeknik Pariwisata Palembang	Dosen Non-Vokasi
80	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	1	Politeknik Pariwisata Palembang	Dosen Non-Vokasi
81	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 ILMU KOMPUTER	1	Politeknik Pariwisata Palembang	Dosen Non-Vokasi

No	Jabatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Lokasi Penempatan	Keterangan
82	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 BAHASA MANDARIN	1	Politeknik Pariwisata Palembang	Dosen Non-Vokasi
83	DOSEN ASISTEN AHLI	UMUM	S-2 BAHASA PERANCIS	1	Politeknik Pariwisata Palembang	Dosen Non-Vokasi
84	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 MANAJEMEN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	1	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi	
85	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Direktorat Tata Kelola Destinasi	
86	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 HUKUM - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	
87	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 MANAJEMEN - S-1 AKUNTANSI - S-1 HUKUM	1	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) | Sekretariat Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan | Bagian Umum | Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
88	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 AKUNTANSI	1	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
89	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan	
90	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI - S-1 AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Direktorat Manajemen Investasi	
91	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI	1	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Direktorat Pengembangan Destinasi I	
92	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	S-1 EKONOMI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN	1	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Direktorat Hubungan Antarlembaga	
93	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Keuangan	
94	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	S-1 HUKUM - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	

No	Jabatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Lokasi Penempatan	Keterangan
95	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI	3	Badan Pelaksana Otorita Borobudur | Direktorat Destinasi Pariwisata | Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur	
96	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI	4	Badan Pelaksana Otorita Borobudur | Direktorat Destinasi Pariwisata | Divisi Amenitas dan Daya Tarik Wisata	
97	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 AKUNTANSI	3	Badan Pelaksana Otorita Borobudur | Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan | Divisi Investasi Pariwisata	
98	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 EKONOMI	3	Badan Pelaksana Otorita Borobudur | Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan | Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata	
99	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	3	Badan Pelaksana Otorita Borobudur | Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik | Divisi Keuangan	
100	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	Badan Pelaksana Otorita Borobudur | Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik | Divisi Komunikasi Publik	
101	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN	3	Badan Pelaksana Otorita Borobudur | Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik | Divisi Umum	
102	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN	1	Badan Pelaksana Otorita Borobudur | Direktorat Pemasaran Pariwisata | Divisi Pemasaran Pariwisata Mancanegara	
103	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 ILMU POLITIK - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 MANAJEMEN - D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	Badan Pelaksana Otorita Borobudur | Direktorat Pemasaran Pariwisata | Divisi Pemasaran Pariwisata Nusantara	
104	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 EKONOMI	2	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba | Direktorat Destinasi Pariwisata | Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur	
105	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI	1	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba | Direktorat Destinasi Pariwisata | Divisi Amenitas dan Daya Tarik Wisata	
106	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI	2	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba | Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan | Divisi Investasi Pariwisata	
107	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI	3	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba | Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan | Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata	
108	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 EKONOMI	2	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba | Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik | Divisi Keuangan	
109	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba | Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik | Divisi Komunikasi Publik	
110	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	3	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba | Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik | Divisi Umum	
111	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 ILMU POLITIK - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL	3	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba | Direktorat Pemasaran Pariwisata | Divisi Pemasaran Pariwisata Mancanegara	
112	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 MANAJEMEN	2	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba | Direktorat Pemasaran Pariwisata | Divisi Pemasaran Pariwisata Nusantara	
113	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	2	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba | Satuan Pemeriksa Intern	
114	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	2	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo | Satuan Pemeriksa Intern	

No	Jabatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Lokasi Penempatan	Keterangan
115	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI	1	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Direktorat Akses Pembiayaan	
116	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI	4	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Direktorat Manajemen Investasi	
117	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 AKUNTANSI	3	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi	
118	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Direktorat Kajian Strategis	
119	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN	3	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif	
120	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 HUKUM	2	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Direktorat Pengembangan Destinasi I	
121	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUKUM - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	4	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Direktorat Pengembangan Destinasi II	
122	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMUNIKASI	4	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Direktorat Tata Kelola Destinasi	
123	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	
124	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 AKUNTANSI	1	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) | Sekretariat Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan | Bagian Umum | Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
125	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN	1	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Direktorat Hubungan Antarlembaga	
126	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	

No	Jabatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Lokasi Penempatan	Keterangan
127	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 HUKUM - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	2	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	
128	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 HUKUM - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI	1	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Direktorat Standardisasi Kompetensi	
129	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	3	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan	
130	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUKUM - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 AKUNTANSI	1	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan | Bagian Umum | Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
131	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI	12	Politeknik Pariwisata Bali | Bagian Administrasi Umum | Subbagian Administrasi Keuangan	
132	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	Politeknik Pariwisata NHI Bandung | Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama	
133	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI	1	Politeknik Pariwisata NHI Bandung | Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Subbagian Administrasi Tenaga Pendidik dan Kemahasiswaan	
134	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	10	Politeknik Pariwisata NHI Bandung | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian dan Keuangan	
135	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN	2	Politeknik Pariwisata NHI Bandung | Bagian Umum | Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
136	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	12	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Keuangan	
137	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 AKUNTANSI - S-1 HUKUM - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL	7	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
138	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 HUKUM	2	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan	
139	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	UMUM	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 SOSIAL DAN POLITIK - S-1 HUKUM	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi	
140	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	UMUM	S-1 HUKUM	1	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi	
141	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Direktorat Akses Pembiayaan	
142	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi	

No	Jabatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Lokasi Penempatan	Keterangan
143	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Pusat Data dan Sistem Informasi	
144	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Pusat Data dan Sistem Informasi	
145	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Direktorat Hubungan Antarlembaga	
146	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	2	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Pusat Data dan Sistem Informasi	
147	PENATA KEPROTOKOLAN	UMUM	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	3	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan | Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga | Subbagian Protokol	
148	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	D-III MANAJEMEN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	Inspektorat Utama | Bagian Umum | Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
149	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	D-III AKUNTANSI	1	Politeknik Pariwisata Lombok | Subbagian Administrasi Umum	
150	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	D-III MANAJEMEN	4	Politeknik Pariwisata Makassar | Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum | Subbagian Administrasi Umum	
151	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III MANAJEMEN PAJAK - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN ASET	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Keuangan	
152	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan	
153	PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA ARAB	UMUM	S-1 BAHASA ARAB - S-1 SASTRA ARAB	1	Deputi Bidang Pemasaran | Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional II	
154	PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	UMUM	S-1 BAHASA INGGRIS - S-1 SASTRA INGGRIS	2	Deputi Bidang Pemasaran | Direktorat Komunikasi Pemasaran	
155	PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	UMUM	S-1 BAHASA INGGRIS - S-1 SASTRA INGGRIS	2	Deputi Bidang Pemasaran | Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif	
156	PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	UMUM	S-1 BAHASA INGGRIS - S-1 SASTRA INGGRIS	1	Deputi Bidang Pemasaran | Direktorat Pemasaran Pariwisata Nusantara	
157	PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	UMUM	S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 BAHASA INGGRIS	1	Deputi Bidang Pemasaran | Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional I	
158	PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	UMUM	S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 BAHASA INGGRIS	1	Deputi Bidang Pemasaran | Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional II	
159	PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	UMUM	S-1 BAHASA INGGRIS	1	Politeknik Pariwisata Makassar | Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum | Subbagian Administrasi Akademik	
160	PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	UMUM	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS - S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 BAHASA INGGRIS	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Komunikasi	
161	PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA MANDARIN	UMUM	S-1 SASTRA TIONGKOK - S-1 BAHASA MANDARIN	1	Deputi Bidang Pemasaran | Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional I	
162	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU KOMUNIKASI	9	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan	
163	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 HUKUM	1	Deputi Bidang Pemasaran | Sekretariat Deputi Bidang Pemasaran | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi	
164	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 HUKUM	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan	
165	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	UMUM	S-1 HUKUM	1	Deputi Bidang Pemasaran | Sekretariat Deputi Bidang Pemasaran | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi	
166	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	UMUM	S-1 HUKUM	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan	
167	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Direktorat Regulasi	

No	Jabatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Lokasi Penempatan	Keterangan
168	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan	
169	PERAWAT AHLI PERTAMA	UMUM	Kualifikasi pendidikan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan | Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga | Subbagian Urusan Dalam dan Pengamanan | Klinik Pratama Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | POLI UMUM	
170	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	Kualifikasi pendidikan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	2	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan | Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga | Subbagian Urusan Dalam dan Pengamanan | Klinik Pratama Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | POLI UMUM	
171	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN	1	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif	
172	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ANALIS TATA RUANG - S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 MANAJEMEN PARIWISATA INTERNASIONAL - S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN - S-1 SOSIAL DAN POLITIK - S-1 ILMU HUKUM DAN SOSIAL - S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH - S-1 EKONOMI UMUM	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Direktorat Kajian Strategis	
173	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 GEOGRAFI - S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN - S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH - S-1 ANALIS TATA RUANG - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 MANAJEMEN PARIWISATA INTERNASIONAL - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ILMU HUKUM DAN SOSIAL - S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Direktorat Manajemen Strategis	
174	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 MANAJEMEN	1	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	
175	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 PLANOLOGI - S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN	1	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) | Sekretariat Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan	
176	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 AKUNTANSI - D-IV DESTINASI PARIWISATA - S-1 PLANOLOGI - S-1 PARIWISATA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan	
177	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	Inspektorat Utama | Bagian Umum	
178	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	Politeknik Pariwisata Lombok | Subbagian Administrasi Umum	
179	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV SOSIAL POLITIK - S-1 SOSIAL POLITIK - D-IV EKONOMI - S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - S-1 EKONOMI DAN MANAJEMEN	1	Politeknik Pariwisata Medan | Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum | Subbagian Administrasi Umum	

No	Jabatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Lokasi Penempatan	Keterangan
180	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 PARIWISATA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ARSITEKTUR - D-IV DESTINASI PARIWISATA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI	4	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Keuangan	
181	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan	
182	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	D-III BAHASA INGGRIS - D-III KOMUNIKASI - D-III DESAIN GRAFIS - D-III HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	Politeknik Pariwisata Bali | Bagian Administrasi Umum | Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Tata Usaha	
183	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-III BAHASA INGGRIS	2	Politeknik Pariwisata Lombok | Subbagian Administrasi Umum	
184	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	D-III DESAIN GRAFIS - D-III PENYIARAN - D-III KOMUNIKASI - D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT	2	Politeknik Pariwisata Makassar | Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum | Subbagian Administrasi Umum	
185	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	UMUM	D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III MANAJEMEN ASET - D-III ADMINISTRASI BISNIS	2	Badan Pelaksana Otorita Borobudur | Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik	
186	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	UMUM	D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN ASET - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS	2	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba | Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik	
187	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	UMUM	D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN ASET - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	2	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo | Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik	
188	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	UMUM	D-III AKUNTANSI	2	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	
189	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	UMUM	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN	1	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) | Sekretariat Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan	
190	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	UMUM	D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan	
191	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	UMUM	D-III MANAJEMEN - D-III AKUNTANSI	1	Politeknik Pariwisata Lombok | Subbagian Administrasi Umum	
192	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	UMUM	D-III AKUNTANSI	1	Politeknik Pariwisata NHI Bandung | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian dan Keuangan	
193	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 ILMU KOMPUTER	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Direktorat Kajian Strategis	
194	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Strategis	
195	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Direktorat Akses Pembiayaan	
196	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER - D-IV TEKNIK INFORMATIKA	2	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi | Bagian Umum | Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	

No	Jabatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Lokasi Penempatan	Keterangan
197	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Direktorat Kajian Strategis	
198	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Strategis	
199	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI	1	Politeknik Pariwisata Lombok | Subbagian Administrasi Umum	
200	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI	1	Politeknik Pariwisata NHI Bandung | Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama	
201	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 TEKNIK KOMPUTER - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI	1	Politeknik Pariwisata Palembang | Subbagian Administrasi Umum	
202	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
203	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	UMUM	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Keuangan	
204	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	UMUM	D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS - D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	2	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan	
205	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	UMUM	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Parekraf	
206	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 GIZI - S-1 TEKNIK PANGAN - S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN	5	Politeknik Pariwisata Bali | Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan | Subbagian Administrasi Tenaga Pendidik dan Kemahasiswaan	
207	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 GIZI - S-1 TEKNIK PANGAN - S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN	1	Politeknik Pariwisata Medan | Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum | Subbagian Administrasi Akademik	
208	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL	UMUM	D-III TEKNIK TATA BOGA	1	Politeknik Pariwisata Lombok | Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	
209	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	UMUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi	
210	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	UMUM	D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III MANAJEMEN	1	Inspektorat Utama | Bagian Umum | Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi	
211	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	UMUM	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	3	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
212	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	Politeknik Pariwisata Bali | Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan | Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama	
213	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	Politeknik Pariwisata Makassar | Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum | Subbagian Administrasi Akademik	
214	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Pusat Data dan Sistem Informasi	
215	STATISTISI AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 STATISTIKA - S-1 MATEMATIKA - S-1 SAINS DATA - S-1 SAINS DATA SPASIAL - D-IV SAINS DATA TERAPAN	1	Deputi Bidang Industri dan Investasi | Direktorat Manajemen Industri	
216	STATISTISI AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 STATISTIKA - D-IV SAINS DATA TERAPAN - S-1 MATEMATIKA - S-1 SAINS DATA - S-1 SAINS DATA SPASIAL	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Direktorat Kajian Strategis	

No	Jabatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Lokasi Penempatan	Keterangan
217	STATISTISI AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 SAINS DATA - D-IV SAINS DATA TERAPAN - S-1 STATISTIKA - S-1 MATEMATIKA - S-1 SAINS DATA SPASIAL	1	Deputi Bidang Kebijakan Strategis | Direktorat Manajemen Strategis	
218	STATISTISI AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 SAINS DATA - D-IV SAINS DATA TERAPAN - S-1 STATISTIKA	2	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Pusat Data dan Sistem Informasi	
219	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	UMUM	Kualifikasi pendidikan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Biro Umum, Hukum dan Pengadaan | Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga | Subbagian Urusan Dalam dan Pengamanan | Klinik Pratama Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | POLI GIGI	
220	WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	UMUM	S-2 MANAJEMEN - S-2 PARIWISATA	1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Parekraf	

LAMPIRAN V
Pengumuman Nomor : PEM/4/KP.04/S/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

DESKRIPSI JABATAN DAN RENTANG PENGHASILAN

NAMA JABATAN	DESKRIPSI JABATAN	PENGHASILAN TERENDAH*	PENGHASILAN TERTINGGI*
AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.	Rp 8.101.650	Rp 8.841.650
AHLI PERTAMA - ANALIS DATA ILMIAH	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis data ilmiah.	Rp 8.101.650	Rp 8.841.650
AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.	Rp 8.101.650	Rp 8.841.650
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Rp 8.101.650	Rp 8.841.650
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis di bidang pengembangan kompetensi ASN.	Rp 8.101.650	Rp 8.841.650
AHLI PERTAMA – ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dananalisis laporan keuangan instansi.	Rp 8.101.650	Rp 8.841.650

NAMA JABATAN	DESKRIPSI JABATAN	PENGHASILAN TERENDAH*	PENGHASILAN TERTINGGI*
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	Rp 8.101.650	Rp 8.841.650
AHLI PERTAMA – ARSIPARIS	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara.	Rp 8.081.650	Rp 8.821.650
AHLI PERTAMA – AUDITOR	Melakukan pengawasan intern atas pengelolaan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenparekraf terutama untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pekerjaan fisik yang ada di lingkungan Kemenparekraf	Rp 8.101.650	Rp 8.841.650
AHLI PERTAMA – DOKTER	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif , preventif, kuratif dan reabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Rp 8.227.050	Rp 8.967.050
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA ARAB	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan Bahasa Arab tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Rp 7.936.650	Rp 8.676.650
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan Bahasa Inggris tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Rp 7.936.650	Rp 8.676.650

NAMA JABATAN	DESKRIPSI JABATAN	PENGHASILAN TERENDAH*	PENGHASILAN TERTINGGI*
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA MANDARIN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan Bahasa Mandarin tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Rp 7.936.650	Rp 8.676.650
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Rp 8.054.650	Rp 8.794.650
AHLI PERTAMA – PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah	Rp 8.101.650	Rp. 8.841.650
AHLI PERTAMA - PERAWAT	Melakukan kegiatan di bidang pelayanan asuhan keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.	Rp 8.101.650	Rp. 8.841.650
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat khususnya Kemenparekraf.	Rp 8.101.650	Rp. 8.841.650
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.	Rp 8.101.650	Rp. 8.841.650
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang,dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.	Rp 8.101.650	Rp. 8.841.650
AHLI PERTAMA -PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan,pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium.	Rp 8.101.650	Rp. 8.841.650
AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.	Rp 8.081.650	Rp 8.821.650

NAMA JABATAN	DESKRIPSI JABATAN	PENGHASILAN TERENDAH*	PENGHASILAN TERTINGGI*
AHLI PERTAMA – STATISTISI	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola penyelenggaraan kegiatan statistik.	Rp 8.101.650	Rp 8.841.650
AHLI PERTAMA- WIDYAISWARA	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah.	Rp 8.227.050	Rp 8.967.050
ASISTEN AHLI- DOSEN	Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Rp 8.546.100	Rp 9.286.100
TERAMPIL – ARSIPARIS	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara.	Rp 6.507.600	Rp 7.247.600
TERAMPIL - PERAWAT	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan.	Rp 6.517.600	Rp 7.257.600
TERAMPIL – PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	Rp 6.507.600	Rp 7.247.600
TERAMPIL – PRANATA KEUANGAN APBN	Melakukan kegiatan pengelolaan keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	Rp 6.932.700	Rp 6.932.700
TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang,dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.	Rp 6.517.600	Rp 7.257.600

NAMA JABATAN	DESKRIPSI JABATAN	PENGHASILAN TERENDAH*	PENGHASILAN TERTINGGI*
TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan,pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium.	Rp 6.200.000	Rp 6.900.000
TERAMPIL - PRANATA SDM APARATUR	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.	Rp 6.517.600	Rp 7.257.600
TERAMPIL – TERAPIS GIGI DAN MULUT	Melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan,pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium.	Rp 6.517.600	Rp 7.257.600
FASILITATOR PEMERINTAHAN	Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di lingkungan Kementerian	Rp 6.603.200	Rp 7.303.200
PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan	Rp 6.603.200	Rp 7.303.200
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun	Rp 6.603.200	Rp 7.303.200
PENATA KEPROTOKOLAN	Melaksanakan kegiatan Keprotokolan di lingkungan Kementerian	Rp 6.603.200	Rp 7.303.200

NAMA JABATAN	DESKRIPSI JABATAN	PENGHASILAN TERENDAH*	PENGHASILAN TERTINGGI*
PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Melaksanakan penyusunan materi hukum dan perundang - undangan	Rp 6.603.200	Rp 7.303.200

Cat:

*Penghasilan bagi pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata sebagaimana tercantum dalam ketentuan Perpres Nomor 109 Tahun 2017, Perpres Nomor 10 Tahun 2019, dan Perpres 111 Tahun 2020